



Maksimalkan TP PKK untuk Kelola Posyandu

Reportase Majalah Gemari Edisi 56/VI/2005

MASALAH pos pelayanan terpadu atau dikenal dengan Posyandu, kembali menyeruak. Padahal sebelum era reformasi kegiatan posyandu yang bertujuan memberikan akses bagi pelayanan kesehatan masyarakat, terutama bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui sudah berjalan baik dan dinilai mantap. Tapi ada apa dengan posyandu kita belakangan ini? Sejauh mana kepedulian dari Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) yang memiliki jaringan sangat luas?

Sejak terjadinya krisis ekonomi, pada tahun 1999 telah dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan berbagai program di bidang Pangan, Gizi, dan Kesehatan namun hasilnya menunjukkan masih adanya kejadian kurang energi protein (KEP) mulai dari KEP ringan, sedang sampai KEP berat, baik pada keluarga miskin (Gakin) maupun keluarga yang tidak termasuk Gakin.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka diperlukan upaya lain yang lebih bersifat pendampingan dari para ahli kepada petugas lapangan maupun kepada keluarga yang mempunyai anak balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu diperlukan 'action program' guna mengatasi masalah gizi masyarakat. Ini diungkapkan Dr Clara M Kusharyanto, MSc dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ketika memberikan pendapatnya perihal penggiatan fungsi posyandu seperti dianjurkan pemerintah saat ini.

Menurutnya, posyandu mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan juga melanjutkan pemberian ASI sampai usia 24 bulan disertai pemantauan pertumbuhan mulai bayi lahir sampai usia 60 bulan. Sampai saat ini pun posyandu masih berperan aktif dalam meningkatkan



pemberian ASI. "Semua kegiatan posyandu sangat tergantung pada kader posyandu," Ketua Pokja Pangan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat IPB ini.

Dikatakan Dr Clara, dengan adanya masalah tingginya prevalensi gizi kurang pada anak balita yang berhubungan dengan tingginya bayi lahir dengan berat badan rendah. Sehingga jika hal ini terus terjadi pada balita berkelanjutan pada masalah pertumbuhan anak usia masuk sekolah. Sedangkan masalah gizi kurang pada anak berkelanjutan pada wanita usia subur, yang akan melahirkan anak dengan risiko berat badan bayi lahir rendah, disertai dengan masalah anemia dan gizi mikro lainnya, seperti kurang yodium, selenium, kalsium, dan seng. Hal ini menyebabkan kegiatan Posyandu bertambah lagi, yaitu yang semula hanya memantau pertumbuhan (Growth Monitoring and Promotion/GMP) bayi sejak lahir hingga lima tahun, menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak Balita.

Keseriusan daerah

Meruaknya kasus kurang memperhatikannya keberadaan posyandu terjadi di berbagai daerah. Misalnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sedikitnya 5.022 bayi di bawah usia lima tahun mengalami kekurangan gizi, bahkan 381 di antaranya dinyatakan dalam kondisi gizi buruk. Sehingga menjadi sorotan kalangan anggota DPRD setempat. Gigih Satria Rahendra dari Komisi D, menyatakan pemerintah daerah masih kurang serius menangani kasus ini. "Apalagi sebelumnya Dinas Kesehatan hanya melaporkan kepada kami bahwa kasus kekurangan gizi di Kabupaten Nganjuk hanya ratusan saja, tetapi ternyata belakangan jumlahnya mencapai 5.022 kasus," tukas wakil rakyat dari PKS ini.

Dari jumlah 381 balita gizi buruk, lanjut Gigih Satria tak satu pun yang dibawa ke rumah sakit setempat untuk memperoleh perawatan kesehatan yang

memadai. Ia berpendapat kasus kekurangan gizi yang terjadi di Nganjuk akibat tidak maksimalnya tugas dan fungsi peran posyandu yang ada di pedesaan. Instansi terkait belum maksimal mendukung program karena jatah pemberian makanan bergizi di bawah standar.

Ditambahkan, posyandu di wilayahnya hanya dijatah pemberian makanan untuk balita hanya Rp200 per anak, padahal standarnya Rp500 per anak. Oleh sebab itu Gigih Satria meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk untuk menambah alokasi dana pemberian makanan bergizi di posyandu.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dr Palgunadi mengaku siap, bahkan pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp146 juta. Dana tersebut akan langsung disalurkan kepada 1.278 unit Posyandu yang tersebar di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Nganjuk. "Karena itu akan selalu dilakukan pemantauan dan pembinaan secara rutin terhadap Posyandu agar bisa memaksimalkan program penanggulangan kekurangan gizi balita. Sehingga kalau program ini bisa berjalan secara maksimal, maka masalah kekurangan gizi di wilayah kami akan teratasi," ujar Palgunadi.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang bertekad akan menambah 500 posyandu pada tahun 2006 sebagai sasaran pelaksanaan program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) 2007. Posyandu itu akan ditempatkan di daerah-daerah kumuh yang jumlah penduduknya dan warga miskinnya relatif banyak.

Bupati Lumajang H Akhmad Fauzi mengharapkan agar masyarakat Lumajang tidak perlu khawatir dengan program itu akan menjadi bom waktu, karena dapat terkikis jika rasa kebersamaan seluruh komponen masyarakat menyatu dan mendukung serta meresapi syair mars lagu Gerbangmas. Oleh

karena itu perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan Gerbangmas sangat berpengaruh dalam keberhasilannya.

Berdasarkan pendataan para kader Gerbangmas telah diperoleh informasi yang meliputi manusia, usaha dan lingkungan. Sampai saat ini yang dilakukan para kader posyandu dan PKK, tidak ditemukan kasus busung lapar. Bupati Lumajang mengimbau agar tim penggerak PKK dan para kader kecamatan maupun desa, melaporkan kepada puskesmas setempat apabila ditemukan tanda-tanda penyakit aneh maupun kemungkinan terjadinya busung lapar.

Geliat penggiatan fungsi posyandu juga terjadi di Kecamatan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Posyandu yang berada di tiap lingkungan RW wilayah ini, mengolah sendiri menu makanan tambahan bergizi berupa susu campur biscuit dan bahan tambahan lain yang didapat di pulau, seperti agar-agar dan rumput laut. Atau berbeda dengan asupan makanan tambahan yang diberikan kepada balita pada umumnya yang berupa bubur kacang hijau.

“Pengolahan makanan tambahan untuk balita yang dibuat sendiri oleh para kader Posyandu, yang awalnya berada di bawah pengawasan Litbang Bandung. Setelah dua minggu kami mencoba resep baru itu ternyata membawa pengaruh positif pada balita. Balita yang kurang gizi terutama kurang sekal berat badannya, tiap minggu ada kenaikan,” ungkap Siti Sumiyati, Koordinator Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kecamatan Pulau Panggang.

Meski awal mencoba makanan itu, para balita merasa mual karena bahan susunya lebih banyak dibanding campuran bahan lainnya sehingga menimbulkan bau amis. Tetapi hal itu lama kelamaan bisa tertanggulangi dan balita semakin terbiasa dengan pemberian makanan tambahan.

Sebelumnya adanya pemberian makanan tambahan dalam variasi baru itu, ungkap Sumiyati, gizi buruk di Puskesmasnya ada 6 balita dengan gizi buruk. Dan kini, tidak ada balita dengan tanda-tanda gizi buruk dari sekitar 650 balita yang ada di Pulau Panggang. Mengingat jumlah balita yang cukup banyak, Posyandu di Pulau Panggang bisa dimiliki satu RW dua Posyandu dengan lima orang kader. "Rata-rata tiap keluarga di sini punya anak lima, jadi masyarakat sendiri yang menginginkan adanya Posyandu yang tidak terlalu jauh dari rumah dan tidak perlu mengantri terlalu lama."

Karena tidak ada cara lain yang lebih baik guna menyarankan kaum ibu peserta Posyandu untuk tidak menambah anak lagi, maka pengarahan langsung pun sering diberikan kepada remaja untuk lebih mengenali kesehatan reproduksinya dan mengoptimalkan fungsi KB di masyarakat.

"Penyuluhan dilakukan secara tidak langsung setiap hari pada saat kunjungan, terutama pada pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, bidan maupun petugas kesehatan menolong persalinan diluar langsung kita motivasi untuk ber- KB. Belakang ini dengan adanya norplane satu kapsul untuk 3 tahun, sudah ada 50 orang mengkonsumsi, adapula indoplane dua kapsul untuk 3 tahun."

Konsep posyandu saat ini, pada dasarnya sama seperti dahulu. Hanya saja pola pemberian asupan gizi yang diubah. Dari 4 sehat 5 sempurna menjadi konsep gizi berimbang. Jadi pemberian komposisi makanan disesuaikan dengan umur dan berat badan anak. Keseriusan para penguasa daerah dalam bertekad memperhatikan serta menggiatkan kembali posyandu tercermin pula dari Walikota Jakarta Timur Drs Koesnan Abdul Halim, SH, MM. Ia mengupayakan peningkatan kesehatan melalui posyandu. "Saya memberikan dukungan penuh kepada ibu-ibu TP PKK. Dengan demikian keberadaan posyandu di masyarakat

sangat penting, khususnya untuk pemantauan kesehatan bayi, balita dan ibu bayi. Sehingga akan semakin cepat terciptanya SDM berkualitas yang sangat penting bagi pembangunan nasional bangsa ini," ujarnya.

Memaksimalkan TP PKK

Keberadaan Tim Penggerak PKK yang memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan menjadi sangat strategis dalam menjalankan posyandu, sehingga upaya mengatasi masalah kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan. Apalagi diyakini bahwa kesehatan mempunyai arti penting dan strategis dalam kehidupan manusia, terlebih dalam membangun bangsa. Upaya meningkatkan kesejahteraan selain dilakukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin juga ditempuh melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.


Maka sangat bijak dan arif, guna membantu menanggulangi berbagai persoalan kesehatan masyarakat, Pelindung TP PKK Pusat Kristiani Herawati Yudhoyono atau dikenal dengan Ibu Ani SBY, meminta kepada jajaran TP PKK mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk senantiasa melaksanakan tugas pengabdianannya dengan niat tulus ikhlas dan tumbuh sebagai gerakan sosial kemasyarakatan yang bebas dari kepentingan politik.

"Kader PKK di mana pun berada merupakan motor penggerak terselenggaranya kegiatan posyandu. Di posyandu inilah kita dapat memantapkan perkembangan anak-anak balita serta kegiatan imunisasi guna mencegah terjangkitnya penyakit menular, seperti tuberkulosis, polio dan kurang gizi, serta mencegah angka kematian ibu dan balita," papar Ani SBY. Maka para kader posyandu diharapkan lebih giat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mereka merupakan ujung tombak untuk memantau perkembangan

tumbuh kembang anak melalui pencatatan kondisi kesehatan balita. Ini untuk mendukung program pemerintah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Tak lupa Ani SBY juga mengingatkan pentingnya administrasi kependudukan antara lain akta kelahiran dan identitas penduduk. Penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan kelahiran anak perlu ditingkatkan melalui para kader penggerak PKK. "Kader-kader PKK selama ini telah bekerja tanpa pamrih, tulus ikhlas, dan tidak memperoleh gaji. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab dan panggilan tugas. Karena memang hanya satu ada dalam benak setiap anggota PKK, yaitu berbuat yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat," tandasnya. **HAR/RW***

[



PAHLAWAN WANITA SEPANJANG ZAMAN

BULAN Desember lalu penuh dengan peringatan Hari-hari besar yang ditandai dengan kegiatan sosial kemasyarakatan yang umumnya terkait perempuan atau kaum ibu. Tanggal 20 Desember kita memperingati Hari Ibu. Tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Tanggal 27 Desember 2006, para anggota PKK, Gerakan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera di seluruh Indonesia dan bangsa kita, akan memperingati Hari Bhakti PKK 2006. Gerakan kaum ibu, yang di tingkat pedesaan marak adalah gerakan PKK.

Gerakan PKK yang dilahirkan pada masa Orde Baru itu pernah dituntut masyarakat untuk dibubarkan karena dianggap sebagai gerakan ibu-ibu yang tidak ada gunanya, kegiatannya dianggap *ngerumpi* atau



ikut campur urusan yang dikerjakan suaminya yang sedang menjabat.

Kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Gerakan PKK telah sangat berjasa membantu dan mendampingi keluarga, umumnya ibu-ibu dan keluarga sederhana di pedesaan dalam memahami aspek-aspek pembangunan, ikut menjadi pendamping para pejabat dan rakyat di pedesaan dalam mengolah pembangunan dan secara berani sangat sering bekerja keras melebihi tanggung jawab yang dipikulnya. Gerakan PKK dengan kader-kadernya di pedesaan bekerja tanpa upah, harus mengeluarkan dana dari kantong sendiri karena program pembangunan di masa lalu banyak yang dilakukan dengan sistem gotong royong yang sebagian kecil saja anggarannya berasal dari pemerintah.

Sejak didirikannya, gerakan PKK selalu membantu masyarakat di pedesaan melalui empat kelompok kerja yang dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di pedesaan. Setiap tahun kelompok-kelompok kerja itu mengadakan pertemuan di pedesaan dan juga di

tingkat kecamatan, kabupaten, kota dan propinsi untuk merancang dan memperbaharui program kerjanya. Gerakan PKK biasanya menampung, bahkan menerjemahkan program-program pemerintah menjadi gerakan yang sederhana dan bisa dilaksanakan oleh rakyat banyak. Menurut pengalaman banyak sekali program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah untuk rakyat banyak selalu diterjemahkan oleh PKK menjadi gerakan masyarakat yang luas dan mandiri.

Gerakan PKK dengan kelompok kerjanya, terkenal dengan nama Pokja PKK dari Pokja nomor satu sampai nomor empat, selalu tanggap terhadap program dan kegiatan yang dirancang pemerintah untuk rakyat, utamanya untuk kaum ibu atau perempuan pada tingkat pedesaan. Pokja I biasanya dikembangkan dengan program-program dalam bidang keagamaan yang secara populer mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena PKK mengembangkan nilai-nilai keagamaan ini dalam program dan kegiatan yang dikerjakan sendiri oleh rakyat banyak, utamanya kaum ibu, maka bentuk programnya berbeda atau bervariasi dari desa ke desa.

Sebagai contoh, beberapa daerah mengembangkan Pokja I berupa program Sema'an Al-Qur'an secara rutin, penyelenggaraan pengajian rutin secara berkala, berlatih merawat atau menyelenggarakan lomba perawatan jenazah, mengadakan Temu Remaja untuk bersama-sama memahami kitab suci AlQur'an, menyelenggarakan sosialisasi UU 23 tahun 2004 khususnya tentang penghapusan KDRT dan perlindungan anak, HAM, Napza, Perda, mengadakan sosialisasi kesetaraan jender dipandang dari sudut agama, atau mengadakan gerakan kebersihan berupa Gerakan Jum'at Bersih.

Kegiatan Pokja II PKK biasanya berupa program operasional

dengan variasi yang menarik. Program dan kegiatan itu antara lain berupa kursus merangkai hantaran lamaran bagi santriwati, mengadakan kursus rias pengantin, mengadakan kursus menjahit dan memotong pakaian, mengadakan kursus ketrampilan daur ulang, mengadakan orientasi kader Bina Keluarga Balita (BKB), mengadakan Lomba BKB dan Pendidikan Dini Usia (PADU). Bahkan ada pula yang secara sungguh-sungguh mengadakan persiapan dan pelatihan guru untuk program PADU yang diselenggarakan secara mandiri.

Kegiatan Pokja III PKK umumnya berhubungan dengan ketahanan pangan, pertanian dan perkebunan, yang dimasa lalu umumnya dikelola dengan sangat intensif. Pokja III biasanya berdampingan dengan Kanwil dan Dinas Pertanian yang dimasa lalu mempunyai program yang sangat intensif di pedesaan.

Program Pokja ini dikembangkan antara lain berupa kegiatan kaum ibu berupa penyuluhan gerakan intensifikasi terpadu, penyelenggaraan kontes produksi pisang mas, kegiatan penyuluhan agar timbul kesadaran dan kehormatan untuk tetap menghargai pemanfaatan pangan lokal berupa kontes pangan lokal, mengadakan pelatihan pembuatan menu PMT-AS, memberi penyuluhan tentang teknik menanam sayuran dengan sistim vertikultur untuk mendukung agropolitan, ketahanan pangan dan peningkatan gizi, penyuluhan gizi secara intensif, penyuluhan rumah sehat dalam program Tri Daya yang marak.

Pokja IV PKK sangat erat hubungannya dengan penyelenggaraan program KB dan Kesehatan. Selama lebih dari tigapuluh tahun para anggota PKK sangat aktif memberikan penyuluhan dan di banyak desa ikut membantu pelayanan KB dan Kesehatan, baik dalam membagi

kontrasepsi atau melakukan penimbangan balita.

Segera setelah gerakan KB dan Kesehatan membentuk Pos Pelayanan Terpadu di desa-desa atau Posyandu di tahun 1983, hampir semua kader PKK menjadi mitra kerja yang sangat akrab dari gerakan KB dan Kesehatan. Program PKK biasanya berupa pengadaan pelatihan atau lomba kader Posyandu, mengadakan Sarasehan Kesehatan Reproduksi Remaja, mengadakan sosialisasi KB, mengadakan kunjungan pada keluarga miskin, atau kurang mampu, yang mempunyai anak Balita, mengadakan sosialisasi KB dan kesehatan sederhana, terutama untuk mencegah adanya penyalit menular, ikut serta membantu distribusi alat dan obat kontrasepsi, garam yodium, ikut mengadakan pelatihan kader Gerakan Sayang Ibu, mengadakan pelatihan pada santriwati, ikut dalam penyuluhan dan gerakan PHBS, sosialisasi PSN dan pemeriksaan jentik.

Karena anggota PKK terdiri dari hampir semua ibu-ibu di pedesaan, bisa saja program dan kegiatan Pokja-pokja itu tumpang tindih. Keadaan ini biasa saja dan tidak menimbulkan masalah. Para ibu di pedesaan biasanya tidak terlalu kaku dalam mengolah kegiatannya di pedesaan.

Inti dari kegiatan mereka biasanya gotong royong untuk memelihara kebersamaan, baik antar tetangga atau dengan ibu-ibu yang berasal dari desa lainnya. Para kader PKK bisa saja saling tukar menukar pengalaman dan meminjam para pelatih atau pendamping yang berasal dari desa tetangganya. Kehadiran pemimpin atau pendamping dari desa tetangga itu biasanya bisa menarik minat untuk kumpul kembali atau menyegarkan minat anggota yang relatif malas berkumpul.

Para pejabat dari dinas dan penggawa desa biasanya juga bisa

bertindak untuk meningkatkan semangat atau memberi masukan berupa petunjuk-petunjuk teknis yang diperlukan oleh para kader dari desa, bahkan tidak jarang mereka diundang untuk memberi penyuluhan secara langsung kepada anggota PKK yang ada. Tidak jarang pertemuan penyuluhan yang seharusnya diundang oleh pejabat dinas justru diselenggarakan oleh kader-kader PKK dengan kehadiran para pejabat dinas. Kerjasama seperti ini bisa meningkatkan kepercayaan kepada kader, tetapi sekaligus mempermudah tugas yang menjadi tanggung jawab para pejabat tingkat kabupaten, kota atau kecamatan.

Pada tingkat pusat gerakan PKK dikoordinasikan oleh isteri Menteri Dalam Negeri dan dibantu oleh suatu tim yang sangat kuat dan dinamis. Pengurus pusat biasanya disebut Tim Penggerak PKK tingkat pusat. Tim Penggerak PKK tingkat pusat mengatur pokok-pokok manajemen dan program PKK untuk seluruh daerah. Tim Penggerak itu juga melakukan kerjasama dengan Departemen atau Instansi tingkat pusat. Dalam kegiatan operasional Pimpinan Tim atau anggotanya sering mengadakan koordinasi dan kunjungan bimbingan bersama-sama ke daerah dan desa-desa.

Pada tingkat kabupaten atau Walikota dipimpin oleh isteri bupati atau isteri walikota. Kalau kebetulan bupati atau walikotanya perempuan maka kepemimpinan dialihkan pada isteri Sekda atau pejabat senior lainnya. Bupati atau Walikota yang rajin dengan gerakan kemasyarakatan merupakan kunci keberhasilan PKK yang sangat penting.

Apabila seorang bupati atau walikota dan istrinya menaruh komitmen dan perhatian yang tinggi terhadap gerakan PKK, maka umumnya PKK di wilayah itu sangat maju. Lebih-lebih kalau kegiatan para isteri bupati dan

walikota itu bisa diteruskan kepada camat dan isterinya, kepala desa dan isterinya, maka PKK di daerah itu akan sangat maju.

Hampir dapat dipastikan kalau PKK di suatu daerah maju, maka banyak sekali kegiatan kaum ibu yang menonjol. Tingkat kesehatan di pedesaan, utamanya penanganan masalah KB dan gizi, penimbangan balita dan pemeliharaan ibu hamil dan menyusui, atau bahkan kegiatan ekonomi keluarga dalam bentuk kerajinan dan sebagainya, relatif maju pesat.

Dalam keadaan kemiskinan yang masih sangat tinggi sekarang, disamping kita harus angkat jempol kepada PKK karena jasa-jasanya, ada baiknya pemerintah dan masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada PKK dan lembaga lain seperti PKK di pedesaan untuk terjun bersama aparat pemerintah melakukan pemberdayaan keluarga agar makin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. PKK dapat membantu meningkatkan peran dan fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang pernah menjadi andalan gerakan KB dan Kesehatan menjadi forum pemberdayaan keluarga agar mampu melaksanakan delapan fungsi utamanya.

Karena delapan fungsi utama keluarga itu menjadi tanggung jawab seluruh Pokja PKK, ada baiknya Posyandu yang sudah mandiri dikembangkan menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang bersama-sama dikelola oleh seluruh Pokja PKK bersama lembaga dan instansi lain secara terpadu di pedesaan. Posdaya bisa menjadi lembaga andalan di pedesaan yang akrab dengan rakyat.

[



Lindungi Anak Mutiara Masa Depan Bangsa

Reportase Majalah Gemari Edisi 66/VII/2006

ANAK-anak merupakan generasi pemilik posisi strategis. Kehidupan mereka menjadi sangat penting dan memiliki pengaruh besar pada masa depan dirinya maupun bangsanya. Namun dalam kesehariannya, mereka seringkali menjadi bagian yang marginal. Kehidupan berkualitas, ceria, bebas, damai seolah-olah masih “jauh panggang dari api”. Lantas dengan momen Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli ini, apakah anak-anak yang sering dijuluki sebagai mutiara suatu bangsa sudah memperoleh perhatian serius?

Di tengah derasny arus globalisasi anak-anak harus tumbuh dan berkembang di tengah kompetisi kehidupan yang ketat dan keras. Dapat dibayangkan di era yang kompetitif ini cukup berat bagi anak-anak untuk ‘belajar’. Setiap anak akan belajar menghargai jika ia tumbuh dalam asuhan kasih sayang. Anak akan belajar melawan jika ia tumbuh dalam penindasan.

Anak menjadikan kekerasan sebagai jalan keluar persoalan jika ia tumbuh dalam alam peperangan. Anak, sering disebutkan orang seperti panah yang lepas dari busur. Mereka adalah anak dari jamannya. Undang-Undang Dasar 1945 pun menegaskan – anak-anak dan fakir miskin ditanggung oleh negara.

“Anak-anak adalah mutiara yang harus dilindungi. Dan di dalam keluarga jadikan anak-anak sebagai sahabat dan guru,” kata kata Dr Seto Mulyadi, tokoh sahabat anak-anak yang juga Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) Indonesia.

*Hubungan anak-anak sebagai sahabat dan guru tersebut dikuatkan selain dalam hubungan pribadi Kak Seto, demikian akrab disapa, dengan buah hatinya seperti tertuang dalam buku *Anakku, Sahabatku, dan Guruku*. Melalui buku tersebut meneguhkan penilaian lelaki kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 28 Agustus 1951, betapa anak dapat menjadi sahabat dalam berbagi masalah.*

Anak, ujar tokoh yang masih saja mengaku tidak selalu tahu tentang anak, juga bisa menjadi guru untuk belajar tentang kreativitas, spontanitas, kebebasan berpikir, pemaaf, tidak pendendam, dan mempunyai kasih sayang yang tulus. “Saya bukan tahu segala hal tentang anak-anak, tapi berusaha untuk tahu tentang mereka. Untuk itu, saya memiliki senjata rendah hati, tidak pernah merasa paling berkuasa di keluarga, menghormati mereka sehingga mereka terbuka kepada saya,” akunya.

Pendiri kelompok bermain Istana Anak-anak di Taman Ria Senayan, Jakarta, tahun 1977 dan kini berkembang menjadi kelompok bermain yang bernaung di Yayasan Mutiara Indonesia ini, berpendapat kebutuhan untuk perkembangan anak sangat penting. Karena itu mantan ‘murid’ Pak Kasur ini berharap agar anak-anak dipenuhi hak-hak mereka. Hak memperoleh suasana

gembira, hak bermain, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam suasana tenang, tanpa merasa tertekan, harus dipenuhi.

Bapak yang memberi halaman luas bagi keempat anaknya - Eka Putri Duta Sari, Bimo Dwi Putra Utama, Shelomita Kartika Putri Maharani, dan Nindya Putri Catur Permatasari - ini berharap, supaya anak-anak aktifbermain, menikmati alam dengan bebas serta lepas. 'Bila anak-anak terlalu dikekang, akibatnya seperti kuda liar,' ujar Kak Seto.

Masih menurut Kak Seto, sekitar 80 hingga 90 persen anak-anak di Indonesia masih belum mendapatkan hak pendidikan, karena arti sebenarnya pendidikan itu adalah hak, bukan suatu kewajiban. "Jutaan anak Indonesia yang ke sekolah karena terpaksa, mendapatkan suasana sekolah yang tidak asyik, dan



tidak menyenangkan, padahal belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan,” tegasnya. Padahal, kata Kak Seto, sudah semestinya anak memperoleh hak dasarnya yang paling dasar, seperti hak memperoleh pendidikan, hak hidup, hak untuk bebas dari rasa takut, dan hak untuk mendapatkan rasa aman.

Hingga sekarang masih ada, bahkan sangat banyak anak Indonesia hingga duapuluh tahun sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1986, yang menetapkan tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional, dan menjelang enam puluh satu tahun Indonesia merdeka, persoalan bukan bertambah ringan. Masih banyak masalah seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi serta perlindungan keselamatan kian ‘memenjarakan dirinya’. Kehidupan keras pun tambah ‘memaksa’, sehingga sangat mudah menjumpai anak-anak di jalanan maupun tempat.

Komisi Perlindungan Anak (KPA) pun, ujarnya, menyerukan kepada pemerintah, agar jangan ada lagi anak-anak jalanan yang mencari nafkah dengan cara berjualan, mengemis, atau mengamen di jalanan. Jangan ada lagi anak-anak jalanan, mereka benar-benar harus dilindungi oleh negara. Sementara itu jumlah kasus kekerasan terhadap anak dalam catatan Komnas HAM Anak dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Khusus kekerasan seksual, Komisi Perlindungan Anak mencatat ada 327 kasus yang didata berdasarkan pengaduan yang mereka terima. Artinya, angka itu bisa bertambah jika menghitung kasus serupa yang tidak diadukan keluarga korban. Pada tahun 2005 lalu saja misalnya, kekerasan seksual terjadi 135 kasus yang 10 kasus di antaranya adalah incest, korban dan pelaku terdapat hubungan darah.

Menghadapi kasus seperti ini Komnas HAM Anak memiliki program bantuan bagi para korban. Baik yang bersifat bantuan terapi dengan membawa anak ke tempat mereka namakan Crisis Center dimana anak dipisahkan jauh

dari lingkungan yang membuatnya trauma maupun bantuan yang bersifat advokasi.

“Seperti pendampingan saat menjalani proses hukum, sampai program kampanye anti kekerasan terhadap anak. Semua perlu dilakukan karena anak harus diselamatkan demi masa depan mereka yang masih panjang,” katanya seraya menandakan, *“dalam upaya penyembuhan ini, peran orang tua lah yang sangat penting. Orang tua diusahakan selalu berada didekatnya agar sang anak merasa dilindungi.”*

Teman sebaya

Sementara itu Sunarko Karsan, yang bertugas di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati sejak 1971 hingga 2000 ini berharap agar anak-anak harus diselamatkan dari ancaman narkoba dan kenakalan. Mantan Kepala Rumah Sakit Tentara Ambon ini sering merasa gelisah, karena penanganan anak-anak nakal dan narkoba sejak dulu dilakukan sebagai ‘proyek’ bukan dengan niat mengentaskan anak-anak dari kehancuran.

“Menyelamatkan anak-anak dari kenakalan dan narkoba jangan dijadikan ajang politik atau proyek yang mendatangkan keuntungan,” kata pensiunan Kolenel TNI AD, kelahiran Pare, Kediri, Jawa Timur, 28 September 1933. Guru Besar Bidang Ilmu Saraf Fakultas kedokteran Universitas Trisakti ini berpendapat, Presiden harus bergerak cepat mengatasi masalah kenakalan anak dan narkoba. Kita harus melihat jauh ke depan, jika anak-anak tidak segera diselamatkan, bangsa ini akan kehilangan generasi penerus yang akan membangun negerinya.

Menurutnya, dalam setiap menangani kenakan anak dan narkoba

seringkali orang menyangka cukup dengan diberikan hukuman pengawasan ketat agar tidak mengulang kesalahan sama. Bahkan kalau perlu saat seminar maupun kampanye antinarkoba, anak-anak diminta mengungkapkan testimoninya di depan umum.

Celakanya, kata Sunarko, banyak pula orang tua malah terkesan membuang anaknya di panti rehabilitasi, kemudian tidak mengurusnya lagi. Ditambah lagi, saat anak-anak tersebut menjadi sorotan media massa, mereka malah ramai-ramai mengadakan gerakan melawan narkoba. Setiap kali dalam mendekati anak, orang tua hendaknya harus bersikap sebagai teman sebayanya. Karena remaja maupun anak-anak lebih mau berbicara dengan teman sebaya dalam setiap masalah ketimbang kepada orang tuanya. "Itu sebabnya, dalam mendidik dan mengasuh anak janganlah dengan cara menggurui anaknya," kata pria yang terjun secara aktif ke dunia anak-anak bermasalah sejak tahun 1968 ini.

Posyandu dan gizi

Supaya anak menjadi mandiri dan tidak ketergantungan, Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Propinsi DKI Jakarta Dra Rohana Manggala, MSi berpendapat, sebetulnya anak dapat mengikuti perkembangan yang ada secara bebas, dengan catatan sekolah-sekolah itu tidak hanya membuat sesuatu yang satu arah dalam pembelajaran, dan lain-lain. Serta tidak dalam bentuk 'teater' semua. Maksudnya, hanya melihat atau menonton guru. Tetapi harus bersama. Namun situasi seperti tersebut saat ini sudah mulai berubah, terutama di sekolah-sekolah terpadu.

Kemudian dalam memperhatikan perkembangan anak tidak hanya memberikan sesuatu dari arah kita, tetapi anak juga diperbolehkan mengikuti

pemberdayaan dapa anak lihat. "Sekarang sudah tidak bisa menerapkan sistem indoktrinasi kepada anak. Namun, nilai-nilai agama tetap harus lebih diutamakan. Agama sangat penting," tandas Rohana Manggala. Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) ini juga menjelaskan betapa pentingnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam mempersiapkan anak-anak berkualitas. Kehadiran Posyandu sangat bermanfaat. "Bahkan jika di DKI Jakarta sudah ada Posyandu Plus, DNI-KS (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial) malah mempersiapkan Posyandu Mandiri. Ini artinya, semua pihak sangat serius dalam keikutsertaannya mempersiapkan anak-anak berkualitas," ujar Rohana Manggala.

Ia menjelaskan, jumlah Posyandu di DKI Jakarta menurut data base per Desember 2005 lalu mencapai 3.872 Posyandu, dan per Januari 2006 meningkat menjadi 3.931 Posyandu. Setiap tanggal 27 setiap bulan ada gerakan Posyandu.

"Memang kita semua harus memiliki komitmen terhadap anak-anak. Mereka merupakan pemilik masa depan. Karena itu kita semua harus menyiapkan mereka secara baik," tegasnya. Senada dengan Rohana Manggala, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Suharti, SKM, bidan desa memiliki peran strategis dalam keikutsertaannya meningkatkan kualitas anak-anak masa depan. Pasalnya, dengan aktifnya bidan melakukan sistem jemput bola sebagai upaya memberi bantuan pelayanan kesehatan, khususnya ibu hamil, ibu bayi, maupun lainnya baik melalui kegiatan Posyandu maupun di tempat praktik.

Menurutnya, dengan bantuan bidan, calon ibu maupun ibu bayi dapat secara dini mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan demi anaknya. Terutama mengenai proses tumbuhkembang anak yang merupakan proses berkesinambungan.

“Proses tumbuhkembang ini ini penting untuk diperhatikan, baik mulai masa embrio, janin dalam kandungan, bayi pra sekolah, sekolah sampai masa remaja. Utamanya paada masa pertumbuhan diusia nol hingga lima tahun, baik untuk fisik maupun otak, khususnya pada fungsi kecerdasannya,” urai ibu dari Santoso Ariwinarto dan Dutameria Dwi Nugraheni. Melalui tenaga medis bidan mengenai pada masa tumbuhkembang yang pesat pada anak tersebut ada saat-saat kritis, terutama terjadi pada waktu pembentukan organ lengkap, di mana gangguan dapat mengakibatkan cacat bawaan. “Untuk proses tumbuhkembang anak dibutuhkan sejumlah zat gizi yang secara kuantitatif dan kualitatif berbeda dengan kebutuhan orang dewasa,” ujar Suharti yang bersama bidan lainnya di wilayah Karanganyar sudah menjalankan program gerakan sayang ibu (GSI).

Karena itu, imbuhnya, semua anggota IBI Karanganyar penting mengetahui pekerjaannya yang bukan saja membantu proses persalinan sebagai pekerjaan luar dinas guna menurunkan angka kematian ibu dan anak, tetapi mampu menangani gizi buruk.

“Sangat dituntut komitmen dan kesadaran semua pihak dalam menyiapkan anak-anak sebagai “panah” yang melesat ke masa depan, dan tugas ini bukan hanya tugas pemerintah semata. Bukan saja anak sebagai titik api tak terpadamkan, tapi mereka juga merupakan mutiara yang harus dilindungi, demi masa depan bangsanya,” kata bidan yang bertugas di Puskesmas Argoyoso, Karanganyar. Setuju! HAR

[



MEMBANGUN MUTU MANUSIA MELALUI PERPUSTAKAAN

PERTENGAHAN Mei 2006 lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, disertai Ibu Negara RI, Ibu Ani Yudhoyono, telah menyempatkan diri berkunjung ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Dalam kunjungan itu Presiden menunjukkan suatu gebrakan percontohan indah yang diperlukan bangsa ini dalam meningkatkan kualitas dirinya, yaitu mengajak setiap insan anak bangsa membiasakan diri memanfaatkan perpustakaan dan membaca buku.

Dengan membaca buku diharapkan setiap anak bangsa bisa mendalami materi yang tersimpan di dalam buku-buku tersebut serta mempergunakan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Presiden juga memberi contoh bahwa sebagai pribadi selalu rajin membeli, membaca dan menyimpan buku-

buku yang telah dibacanya dengan baik, pada suatu hari nanti beliau berharap banyak anak bangsa yang lain bisa juga menikmati simpanan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam buku-buku tersebut melalui perpustakaan yang dipersiapkannya.

Sejalan dengan seruan Presiden tersebut, Klub Perpustakaan Indonesia (KPI) yang didirikan sejak tahun 1982, mengadakan Temu Karya Nasional III yang telah digelar dengan berhasil awal minggu lalu. Temu Karya Nasional III yang dibuka oleh Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari berbagai daerah, yaitu perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan dalam lingkungan masyarakat. Gagasan Temu Karya Nasional III itu sejalan dengan upaya bangsa untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Perpustakaan modern dewasa ini tidak saja menyajikan ilmu pengetahuan dalam bentuk buku tetapi juga ilmu dan kandungan perpustakaan dalam bentuk-bentuk yang lebih canggih. Ada banyak perpustakaan yang menyajikan materi melalui tampilan elektronik yang mudah di akses dari jarak yang sangat jauh. Perpustakaan dan bahan-bahan yang terkandung didalamnya tidak saja harus dikunjungi dan diakses secara fisik, tetapi seseorang dengan mudah bisa mengakses bahan-bahan itu dari rumahnya, dari kantornya, atau bahkan dapat menyertakannya dalam kuliah terbuka di ruang kuliah.

Dalam paparan dimuka Temu Karya Nasional III di Jakarta minggu lalu itu, Prof. Dr. Haryono Suyono, yang sedang gigih bekerja keras memperjuangkan penyegaran dan pengembangan Posyandu sebagai wahana pemberdayaan rakyat, menantang para Pustakawan untuk ikut

berjuang dengan menghantar bahan-bahan yang sangat berharga dan tersimpan dalam berbagai Perpustakaan itu kepada masyarakat di pedesaan.

Pertama, para Pustakawan diharapkan berusaha membangun dan membuka Perpustakaan Umum di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, atau tempat-tempat lain yang mudah di akses oleh masyarakat luas.

Kedua, secara proaktif para Pustakawan menghantar bahan-bahan bacaan, kalau perlu membacakan bahan-bahan itu, kepada masyarakat yang berkumpul di Posyandu di pedesaan. Bahan-bahan yang mengandung manfaat besar harus sesegera mungkin diantar kepada para pengurus Posyandu di pedesaan.

Tujuannya adalah agar masyarakat desa dapat memperoleh manfaat yang besar atas materi yang sangat berharga dan selama ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang sedang sekolah atau mampu berkunjung ke Perpustakaan karena peluang yang dimilikinya. Kebiasaan membaca bahan-bahan perpustakaan harus dikembangkan menjadi "*kegiatan mendaratkan*" atau mencoba dan mempratekkan isi dari bahan-bahan yang tersimpan dalam buku.

Upaya membudayakan kebiasaan membaca sebaiknya dilakukan sejak saat yang sangat dini, misalnya dengan memberikan hadiah buku pada saat ulang tahun, atau pada saat anak balita berulang tahun. Orang tua dapat mengembangkan budaya mencintai buku dengan membacakan dongeng dalam buku kepada anaknya. Dengan secara terus menerus melihat ibu atau bapaknya membacakan buku, akan

merangsang anak balita ketawa dan bergembira, dan membuatnya ketagihan buku bacaan.

Dalam suasana Hari Lansia pada hari ini, upaya lain yang dapat dilakukan dalam Posyandu adalah membacakan buku-buku yang berisi pemberdayaan kepada calon lansia dan lansia yang buta aksara agar dapat membantu mengembangkan karier yang kedua. Orang tua sederhana yang bisa menikmati dan mengambil manfaat dari bacaan, akan rela mengirim anak-anaknya ke sekolah karena melihat manfaat yang dirasakannya dari buku yang dibacakan kepadanya.

Disamping itu kecintaan dan apresiasi lansia pada buku akan merangsang anak-anak dan cucu mereka yang sedang sekolah untuk mencintai buku. Penduduk dan masyarakat dapat menikmati buku, biarpun anggota yang bersangkutan, karena buta aksara, belum bisa menikmatinya secara langsung.

Keterbatasan anggaran dan kemampuan daya beli yang masih terbatas tidak boleh menjadi alasan bagi Perpustakaan untuk tidak bisa mengajak masyarakat mencintai buku, biarpun Perpustakaan tidak memiliki buku baru atau bahan-bahan bacaan yang menarik. Dalam situasi sulit seperti sekarang, para pengelola Perpustakaan harus pandai-pandai mencari sponsor untuk menambah koleksi dan menjadikan para sponsor sebagai bapak atau ibu asuh.

Bapak atau ibu asuh, termasuk anak-anak sekolah yang baru lulus, dapat menyumbangkan buku yang mereka pergunakan kepada Perpustakaan yang dipilihnya. Perpustakaan penerima hibah buku dengan penuh rasa terima kasih dapat mencantumkan nama-nama

penyumbang pada buku yang diterimanya.

Apresiasi itu akan mendorong penghargaan antara penyumbang, Perpustakaan dan pembaca buku yang menikmati sumbangan buku-buku tersebut. Cara ini dapat memperbanyak koleksi dan sekaligus memperbaharui bahan-bahan yang tersedia dalam setiap Perpustakaan.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan kerjasama antara penerbit buku yang baik, yaitu menawarkan kesertaan sebagai donor agar setiap kali ada penerbitan buku baru, beberapa buku secara otomatis, atas beban para donor, dapat langsung dikirimkan kepada alamat-alamat yang telah disepakati. Buku sumbangan itu, seperti halnya buku sumbangan lainnya, dapat sekaligus dicetak dengan mencantumkan nama penyumbangnya untuk mendapat apresiasi dari para pembaca yang setia.

Berbagai kegiatan itu bisa merupakan upaya baru untuk menghargai buku dan mengembangkan budaya baca sebagai kekuatan pendukung untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan yang mampu mengantar pembangunan bangsa yang jaya dan sejahtera.

[



Penyediaan Sarana Perpustakaan di Posyandu

Reportase Majalah Gemari Edisi 66/VII/2006

***P**OSYANDU diharapkan bisa menyediakan wadah taman bacaan bagi masyarakat. Melalui gerakan revitalisasi Posyandu yang belakangan ini kian marak direalisasikan, Posyandu tidak lagi berkonsentrasi pada masalah kesehatan tapi juga memadukan unsur penting lainnya. Penyediaan sarana perpustakaan di Posyandu merupakan salah satu terobosan menarik untuk meningkatkan minat baca masyarakat.*

Mengingat budaya pelayanan terpadu sudah lama ada di Posyandu, Menteri Pendidikan Nasional pun sebenarnya telah cukup lama melirik Posyandu sebagai wadah pendidikan bangsa. Model Posyandu Plus atau reborn Posyandu diharapkan bisa mewakili semangat revitalisasi Posyandu yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak kalah menariknya, Presiden SBY pun belum lama ini melakukan gebrakan gemar membaca dan

membiasakan diri memanfaatkan perpustakaan.

“Tak ada salahnya bila perpustakaan itu juga ada di tiap-tiap Posyandu. Buku-buku yang nantinya kami berikan pastinya adalah buku-buku yang menyenangkan. Misalnya, buku-buku tentang hidup bersih, jasa boga, cinta alam, respek kepada orang lain dan sebagainya,” tutur Prof DR Ir Dody Anandika, Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di sela acara Temu Karya Nasional III Klub Perpustakaan Indonesia beberapa waktu lalu di Auditorium Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta.

Menanggapi hal ini, Prof DR Haryono Suyono Wakil Ketua I Yayasan Damandiri yang juga penggagas Posyandu mengatakan perpustakaan sekolah, perpustakaan masyarakat diharapkan bisa menjadi unit-unit profesional yang secara proaktif mengantarkan buku-bukunya ke pusat-pusat Posyandu di



masyarakat sehingga pengasuh-pengasuh balita di Posyandu hingga lansia dapat mengambil manfaat dari buku-buku yang tersedia di Posyandu. Dengan sendirinya, kata Prof Haryono, selama 1 tahun buku beredar dari Posyandu ke Posyandu. Sebagai daya tariknya, bisa dilakukan lomba baca cepat, komprehensif, kuis-kuis yang diambil dari buku anak-anak hingga lansia. Posyandu jadi komunikasi ilmiah tapi sederhana. Gerakan Posyandu juga bukan gerakan rutin, karena tiap kali ada materi buku atau buku baru bagaimana anak-anak sekolah membaca cepat tapi mengerti dengan apa yang dibacanya.

Diakui Gardjito, Kepala Perpustakaan Nasional, problem utama dari perpustakaan di Indonesia adalah minat baca. Jadi, kalau membuat perpustakaan lengkap tapi buku-bukunya tidak diminati, juga menjadi kendala bagi perpustakaan yang berkembang. Oleh karena itu, Gardjito menyambut baik ajakan Mendiknas dan Yayasan Damandiri untuk bersama menghidupkan Posyandu dengan membangun taman bacaan di Posyandu. Program pengembangan minat baca yang bakal digelar Yayasan Damandiri, menurut Rochadi dari Yayasan Damandiri, masih melalui program sekolah unggul yang diperoleh secara tidak langsung untuk belajar terus menerus.

“Untuk mengembangkan sekolah yang bagus, perpustakaan tidak boleh tertinggal. Fasilitas yang akan diberikan oleh Yayasan Damandiri melalui sekolah unggul antara lain buku-buku, fasilitas pelayanan perpustakaan yang baik seperti software. Sebelumnya, kita juga melihat terlebih dahulu bagaimana jumlah buku, siapa yang meminjamkan buku dan sebagainya,” papar Rochadi yang juga akan mengembangkan kerjasama dengan KPI menggunakan pola yang sama dengan sekolah unggul, namun diharapkan lebih terpadu dengan program peningkatan minat baca. **RW**

[



MENYONGSONG HARI KEPENDUDUKAN DUNIA

SELAMA 16 tahun terakhir ini lembaga Kependudukan PBB, UNFPA, selalu mempergunakan Hari Kependudukan Dunia yang diperingati setiap tanggal 11 Juli untuk meningkatkan kesadaran dunia akan pentingnya penanganan masalah kependudukan dan pembangunan.

Kepala-kepala perwakilan UNFPA di seluruh dunia dianjurkan mengundang pemimpin setiap negara, politisi dan panutan masyarakat untuk mengembangkan seruan dan menggelar acara-acara penting yang intinya menggugah komitmen politik, seruan yang merangsang perhatian dan kerja keras untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, utamanya kaum muda dan mereka yang termarginalisasi dalam pembangunan.





Khusus tahun ini, pimpinan UNFPA menganjurkan agar kaum muda dilibatkan dalam perencanaan program, pelaksanaan di lapangan serta kalau perlu menyelenggarakan sendiri acara-acara yang ditujukan untuk mereka dan menjadi pemain yang dengan penuh kebanggaan mengantar penduduk muda ke masa depan yang lebih mantab. Keterlibatan kaum muda itu sangat vital karena berbagai alasan.

Salah satu alasan yang dikemukakan UNFPA adalah karena dunia bertambah muda, hampir separuh dari penduduk dunia berusia dibawah 25 tahun. Ini berarti sekitar 3 milyar, sekali lagi 3.000.000.000 anak muda akan memasuki usia produktif, usia subur, yang mempunyai keunikan tersendiri. Mereka tidak bisa menjadi obyek pembangunan, mereka harus tampil tegar menjadi subyek pembangunan yang dinamik.

Pertama-tama tiga milyar remaja itu harus mendapat kesempatan memperoleh informasi dan fasilitas pelayanan reproduksi agar tidak terjerumus pada keterpaksaan untuk kawin pada usia muda, menikmati hubungan seksual secara salah, menderita penyakit seksual karena keinginan yang keliru, apalagi tidak siap menghadapi resiko ketularan virus HIV, dan menderita penyakit AIDS sepuluh atau limabelas tahun nanti, pada saat sedang menanjak kariernya.

Di negara berkembang persoalan remaja lebih serius lagi. Pada sekitar 57 negara berkembang, sekitar 40 persen penduduknya berusia dibawah 15 tahun. Di seluruh dunia, umumnya di negara berkembang, ada sekitar 238 juta remaja hidup kurang dari US\$ 1,00 setiap harinya. Jumlah ini merupakan sekitar 22,5 persen dari jumlah remaja di seluruh dunia. Kemiskinan di masa lalu, utamanya di pedesaan, diselesaikan dengan mengawinkan anak-anak remaja, umumnya anak perempuan, secara dini, sehingga terjadi perkawinan usia dini dengan segala permasalahannya.

Karena itu, utamanya di banyak negara berkembang, pertama-tama diperlukan fasilitas informasi dan pelayanan reproduksi bagi hampir 1.500.000.000 remaja, usia 10 - 24 tahun, yang segera akan memasuki masa reproduksi. Utamanya, Hari Kependudukan Dunia sebaiknya diisi dengan seruan kepada pemimpin negara maju dan negara berkembang untuk tanpa ragu-ragu mendukung penyediaan tidak saja klinik reproduksi, tetapi tanpa ragu-ragu mengundang ahli-ahli reproduksi untuk berkunjung ke sekolah dan fasilitas remaja lainnya guna meningkatkan kesadaran, memberdayakan generasi muda dan lingkungannya agar siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi.

Usaha meningkatkan, mendewasakan usia kawin, sebagian telah membawa hasil. Namun demikian, himpitan kemiskinan masih menyisakan pelarian dengan perkawinan muda di banyak bagian dunia, utamanya di daerah pedesaan. Tidak kurang dari 82 juta gadis-gadis muda berusia antara 10 – 17 tahun akan harus segera menikah dibawah usia 18 tahun. Kondisi ini memprihatinkan, tetapi belum ada cara lain yang bisa dipilih oleh orang-orang tua yang kehabisan akal dalam himpitan kemiskinan di pedesaan, yang seharusnya mendatangkan kemakmuran kepada keluarganya.

Bagi Indonesia, Hari Kependudukan Dunia bisa ditandai dengan menyegarkan kembali komitmen segala lapisan terhadap upaya pemberdayaan penduduk dan masa depannya. Apalagi peringatan Hari Kependudukan Dunia tersebut sangat dekat dengan peringatan Hari Koperasi tanggal 12 Juli 2006.

Kedekatan tersebut mengandung pesan yang sangat berarti karena penduduk negara berkembang, termasuk dan utamanya penduduk Indonesia, bukan penduduk yang bisa mandiri secara individual, tetapi perlu bersatu dalam kebersamaan untuk membangun.

Pemberdayaan penduduk melalui pemberdayaan keluarga dalam Posyandu bisa saja menjadi ajang pengembangan secara gotong royong seperti diamanatkan kehidupan koperasi untuk mereka yang tidak mampu mandiri secara individual. Pesan yang sangat berharga.

Struktur penduduk Indonesia juga mirip dengan struktur rata-rata penduduk dunia, yaitu makin dewasa tetapi jumlah tenaga mudanya, dibawah usia 24 tahun, masih menjadi bagian yang dominan dan perlu

pemberdayaan secara paripurna. Bangsa kita sangat kaya, tetapi kekayaan terbesar adalah pada jumlah penduduknya yang banyak. Indonesia mempunyai penduduk yang jumlahnya besar dan akan tetap bertambah.

Pada tahun 2025 diproyeksikan sekitar 275 juta jiwa, atau bahkan lebih besar lagi. Kalau penduduk dunia sudah mulai menjadi penduduk usia dewasa, sebenarnya penduduk Indonesia juga sudah makin dewasa usianya. Jumlah penduduk dibawah usia limabelas tahun hampir tidak bertambah, tetapi yang berusia 15 – 24 tahun masih merupakan bagian besar dari penduduk yang bertambah dewasa tersebut. Kalau pertumbuhannya dapat terus diturunkan, pada tahun 2025 penduduk dibawah 15 tahun akan tetap, tetapi penduduk remaja tetap melipat dengan besaran yang bisa menjadi penyebab ledakan penduduk yang lebih dahsyat.

Artinya kewajiban orang tua Indonesia kepada anak-anaknya adalah meningkatkan mutu, tidak lagi disibukkan membagi kue pada jumlah anak yang bertambah tanpa kendali. Kewajiban pendidikan dan pemberdayaan untuk menyiapkan lapangan kerja dan pekerjaan yang memberi nilai tambah yang memadai bertambah tinggi.

Kita harus isi Hari Kependudukan Dunia bukan dengan sekedar menyajikan poster atau hura-hura tanpa makna. Kita secara serius diundang meningkatkan komitmen dan langkah nyata mengembangkan potensi anak muda dan remaja Indonesia menjadi manusia bermutu yang sanggup membawa bangsa dan negara Indonesia kepada kejayaan masa depan.

[

Kalsel Bergiat Posyandu Plus

Reportase Majalah Gemari Edisi 63/VII/2006

BETAPA pentingnya pos pelayanan terpadu (Posyandu) di Indonesia dalam membantu memberikan penguatan dasar baik kesehatan ibu dan anak sebagai wujud pembangunan sumber daya manusia. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) juga berkomitmen menggiatkan Posyandu di wilayah Propinsi Kalsel melalui roadshow.

Menyikapi pentingnya Posyandu bagi peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) khususnya ibu dan anak, setiap Propinsi dan Kabupaten/Kota kini serentak melakukan gerakan kegiatan penguatan Posyandu atau revitalisasi Posyandu. "TP PKK Kalsel berupaya memperkuat keberadaan Posyandu-Posyandu, bahkan berusaha menindaklanjutinya dengan meningkatkan kelas Posyandu menjadi Posyandu Plus, Posyandu Mandiri dengan kegiatannya



meliputi kesehatan ibu dan balita, pendidikan, lansia, maupun ekonomi keluarga,” kata Pimpinan TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dra Hj Djauhar Manikam Muchlis Gafuri.

Di Provinsi Kalsel, tambahnya, penggiatan Posyandu Plus dilakukan dengan penuh gelora. Posyandu Plus di Kalsel, semua ada pada satu wadah. Artinya, dalam Posyandu Plus tersebut ada kegiatan lansia, BKB (Bina Keluarga Balita), PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Dasawisma, dan sebagainya.

Kegiatan Posyandu Plus di wilayah Kalsel, lanjut Hj Djauhar, memang baru mulai bergiat, tapi tidak mengurangi semangat semua pihak untuk mendukung program ini. Pasalnya, Posyandu Plus ini baru dilaksanakan di tingkat Provinsi dan diharapkan kabupaten/kota yang ada di Kalsel mencontohnya. Terlebih kegiatan Posyandu Plus tersebut memang belum pernah ada sebelumnya.

“Karena kita baru dengan Ibu Gubernur baru pula, maka kita lakukan kegiatannya secara bertahap sehingga ke depan sambil melakukan penyempurnaan-penyempurnaan mengenai Posyandu Plus itu, yang kemudian kita tambah dengan kegiatan road show,” jelas Pimpinan TP PKK Provinsi Kalsel.

Road show tersebut, merupakan kegiatan temu kader keliling ke seluruh kabupaten/kota di Kalsel dengan melibatkan semua instansi terkait, baik Diknas, Dinkes, BKKBN. Itu semua ditampilkan setiap Kelompok Kerja (Pokja) I sampai IV, karena memang hanya ada empat Pokja. Milsanya, kata Hj Djauhar, Pokja I menampilkan tema “Narkoba” dengan contoh obat-obatan dan sebagainya, dengan narasumber dari instansi terkait. Pokja II pendidikan, seperti PAUD, BKB, Kejar Paket A, dan lainnya. Pokja III menampilkan makanan-makanan pangan yang sehat, dan sebagainya. Kemudian Pokja IV revitalisasi Posyandu.

Melalui Posyandu Plus pula, tandas Hj Djauhar, pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) untuk daerahnya dilaksanakan. Namun demikian karena dilakukan secara nasional dan serentak, maka tempat umum pun ikut dimanfaatkan. Dalam pelaksanaan PIN belum baru lalu, Kalsel berhasil mencapai 78 persen. “Kesadaran masyarakat sudah mulai cukup tinggi,” tandas istri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel.

*Selain itu, untuk menghidupkan sebagian kecil Posyandu yang tidak aktif di Kalsel, dilakukan terobosan dengan cara memberi hadiah kepada setiap pengunjung misalnya, selain pemberian makanan tambahan (PMT). Tujuannya tidak lain agar revitalisasi Posyandu ini bisa memberikan yang terbaik untuk kebangkitan Posyandu di Provinsi Kalsel. **HAR***

[



MEMBAWA PENDEKATAN GANDA KE BRAZIL

PAGI itu di Brazilia, Brazil, suatu Konperensi tentang kesejahteraan sosial dunia di mulai. Utusan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Saya Sendiri (Prof. Dr. Haryono Suyono) sebagai Ketua Umum Dewah Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial,. Direncanakan ikut dalam rombongan untuk menghadiri pertemuan itu wakil-wakil dari Indonesia lainnya, antara lain Direktur Pengentasan Kemiskinan Depsos, Ibu Dr. Titi Sulistiati, Sekjen DNIKS, Ibu Ir. Wahyu Sulistiyowati Dilt, Kepala Dinas Pemberdayaan Pemda DKI, Ir. Oloan Siregar, MSc., Yayasan Indra, Dr. Rohadi Hariyanto, MSc., dan Yayasan Damandiri, Mulyono Daniprawiro, MBA.

Rombongan lain dari daerah-daerah ikut pula menghadiri pertemuan internasional yang ke 32 tersebut. Pertemuan ini menjadi

menarik karena mengambil tema Pengentasan Kemiskinan yang dalam dua kali pertemuan para pemimpin dunia di PBB di tahun 2000 dan diulang pada tahun 2005, tema pokok ini mendapat dukungan komitmen politik yang sangat tinggi.

Para pekerja dan ahli dalam bidang pembangunan sosial ditantang untuk tidak saja mahir menyelesaikan masalah yang dihadapi para penyandang masalah sosial, tetapi terjun langsung bersama para perancang pembangunan agar setiap langkah yang dilakukan untuk membangun utamanya memperhatikan keluarga dan penduduk yang kalau tidak diberikan dukungan pemberdayaan bisa-bisa terjerumus dalam keterpurukan dan bakal pasti menjadi penyandang masalah sosial.

Pendekatan dini tersebut biasanya tidak menjadi perhatian atau dibuat tidak menjadi perhatian para ahli dibidang sosial. Umumnya para ekonom yang bekerja dibidang perencanaan mengarahkan pembangunan untuk menghasilkan nilai tambah yang gegap gempita dalam bidang ekonomi karena mengejar pertumbuhan. Para ahli pembangunan dalam bidang sosial tertinggal, atau ditinggalkan karena tidak bisa menjanjikan hasil pembangunan yang bisa menaikkan pendapatan, menaikkan pajak, atau menaikkan nilai tambah dalam ukuran uang.

Pertemuan di Brazilia diharapkan membuka mata para ahli bahwa tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan kepada para penyandang masalah sosial, ahli-ahli pengembangan di bidang sosial kemasyarakatan harus berani tampil beda. Mereka harus ikut terjun dalam perencanaan pembangunan dan mengundang komitmen politik yang lebih gencar agar pembangunan dititik fokuskan pada pembangunan manusia dan



keluarga yang diarahkan sebagai proses pemberdayaan. Proses tersebut tidak saja berjalan secara linear, tetapi diarahkan untuk memberi dukungan secara berkelanjutan kepada keluarga dan penduduk yang kurang mampu.

Mengacu pada *Millenium Development Goals (MDGs)*, yang dua tahun berturut-turut menjadi perhatian para pemimpin dunia, para ahli pembangunan dibidang sosial harus secara sungguh-sungguh tampil berjuang dengan gigih agar anggaran dan program-program di bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, lingkungan dan kerjasama yang lebih erat antar anak bangsa, di dalam maupun di luar negeri, diarahkan untuk saling memberi perhatian dan bantuan sehingga kesenjangan dapat dikurangi dan akhirnya dihapus sama sekali.

Kesejangan yang terhapus itu, apabila disertai dengan moral dan budaya bangsa yang mengagungkan kebersamaan dan kerjasama akan menghasilkan keadilan yang selama ini bergaung saja dalam wacana, mimpi dan hampir belum pernah terwujud dalam kehidupan sehari-hari.

Konperensi di Brazilia tersebut, yang konon akan mendengarkan banyak masukan dari seluruh dunia, termasuk masukan khusus dari Indonesia, akan menjadi ajang yang menarik untuk diamati. Pertanyaan yang menggelitik, yang antara lain akan disodorkan usulan Indonesia, adalah partisipasi yang lebih luas dari seluruh *stakeholders*, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan utamanya masyarakat madani yang potensinya sebenarnya sangat kuat dan berkelanjutan.

Indonesia akan mengajak masyarakat dunia untuk secara sungguh-sungguh mengembangkan komitmen politik dengan menjadikan garapan sosial secara dini sebagai ajang perjuangan sosial politik yang menarik sehingga peminatnya banyak dan luas. Komitmen tersebut diharapkan muncul tidak saja dalam bidang pelayanan *rescue* seperti yang umumnya terjadi dalam bidang penanganan masalah sosial, tetapi juga dalam menghasilkan komitmen politik, legislasi, keikutsertaan serta substansial dalam perencanaan, arus program utama dalam pembangunan sosial politik yang utama serta penggarapan yang komprehensif terhadap seluruh anak bangsa tanpa kecuali.

Penggarapan yang menyisihkan mereka yang mempunyai masalah sosial, dengan *promise* penyelesaian secara terpisah, sesungguhnya harus menjadi pendekatan kuno yang tidak perlu lagi ada dalam masa yang harus menghargai hak-hak azasi manusia yang universal dewasa ini.

Indonesia juga akan mengajukan konsep langkah-langkah operasional yang sederhana dan telah terbukti ampuh dalam penanganan masalah KB dan Kesehatan di masa lalu, yaitu mengundang partisipasi masyarakat pedesaan dalam kelompok Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Posyandu yang dimasa lalu dikenal sebagai Pos KB dan Kesehatan diusulkan menjadi Pos Pemberdayaan Terpadu (Posyandu) yang makin mandiri dimana keikutsertaan masyarakat luas bisa mengisi kegiatan dengan beraneka ragam unsur pembangunan untuk mengantar setiap keluarga makin mahir menguasai fungsi-fungsi keluarga yang kita kenal sangat lengkap.

Karena itu banyak pejabat, pekerja dan ahli pembangunan sosial kemasyarakatan yang berkumpul di Brazil mengharapkan dapat melihat maksud baik Indonesia tersebut dan diundang untuk bekerja sama membangun dengan sikap dan tingkah laku yang lebih terhormat serta komprehensif. Indonesia akan mengajak para ahli untuk mencermati dan mengetrapkan pendekatan itu di negara masing-masing agar dalam kesempatan pertemuan internasional di masa depan dapat dibandingkan hasil-hasil atau kesukaran yang mungkin timbul dalam membawa suasana pembangunan yang memihak kepada keluarga kurang mampu, atau proses pemberdayaan tersebut.

[



BANGKIT MELAWAN PEMISKINAN

MENYONGSONG Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional tanggal 17 Oktober 2006, selama 24 jam antara tanggal 15 - 16 Oktober, , di seluruh dunia akan diselenggarakan Kampanye Bangkit (*Stand Up*) melawan Pemiskinan, Bangkit untuk menyukseskan pelaksanaan target-target *Millennium Development Goals* (MDGs). Kampanye Bangkit ini diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pendukung guna mengingatkan, mendorong, mendukung dan menyegarkan komitmen pemimpin dan rakyat di seluruh dunia dalam upaya memerangi pemiskinan, yang tekad bulatnya telah dicanangkan bersama di PBB pada tahun 2000, dan kemudian diperbaharui lagi pada tahun 2005.

Panitia Kampanye Milenium Dunia atau *Millennium Campaign* yang



merupakan badan resmi PBB untuk merangsang partisipasi masyarakat secara luas guna menyegarkan komitmen dan menyukseskan pelaksanaan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, baik

melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memotong rantai kemiskinan, atau upaya pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas yang mudah diakses oleh keluarga kurang mampu, telah bekerja keras untuk mengerahkan sebanyak mungkin peserta dalam kampanye dunia tersebut.

Untuk itu Panitia Kampanye Milenium Dunia telah bekerja sama dengan *Guinness World Records* dan *Muri* untuk mencatat jumlah peserta kampanye di seluruh dunia umumnya, atau di Indonesia pada khususnya. Dukungan kampanye ini diharapkan tidak saja menyegarkan para pengambil keputusan, tetapi utamanya memberikan dorongan nyata berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara besar-besaran agar upaya pengentasan kemiskinan benar-benar memberi manfaat terhadap sasaran yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan dampak komunikasi dan meningkatkan gencarnya upaya pengentasan kemiskinan di seluruh dunia, kampanye ini akan diselenggarakan di tingkat pusat dan di seluruh dunia dengan tema yang seragam, yaitu *STAND UP against Poverty, Stand Up for the Millennium Development Goals (MDGs)*, yang disini secara resmi diperkenalkan sebagai kampanye *Bangkit Melawan Pemiskinan, Bangkit untuk Tujuan Pembangunan Melenium*.

Seperti diketahui, *Millennium Development Goals (MDGs)* yang disepakati oleh 189 pemimpin dunia pada tahun 2000, dan disegarkan kembali dengan kesepakatan pemimpin dunia yang baru pada tahun 2005, mempunyai 8 tujuan terpadu yang tidak saja akan menaikkan mutu manusia tetapi juga menggalang kerjasama internasional, regional maupun nasional yang terpadu.

Tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dengan target sekurang-kurangnya pengurangan separo penduduk miskin pada tahun 2015. Disamping itu disepakati pula komitmen untuk memenuhi pendidikan dasar secara universal di seluruh dunia. Para pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan upaya pemberdayaan kaum perempuan dengan perhatian yang tinggi pada kesetaraan gender.

Mereka juga menaruh perhatian pada anak-anak penghuni planet masa depan dengan komitmen menurunkan angka kematian balita dan sekaligus melindungi ibu-ibu yang mengandung dan melahirkannya dengan upaya nyata melindunginya dari kematian sia-sia karena mengandung dan melahirkan tersebut.

Secara jelas para pemimpin dunia juga sangat sadar akan bahaya serangan virus HIV/AIDS yang dahsyat sehingga deklarasi PBB itu mengandung pesan juga untuk memerangnya, sekaligus termasuk penyakit malaria yang masih marak di berbagai belahan dunia, atau penyakit menular lain yang belum seluruhnya bisa ditanggulangi. Para pemimpin juga memberi perhatian terhadap lingkungan hidup dan sekaligus mengundang kerjasama, kemitraan dan partisipasi global, regional maupun lokal antar daerah untuk keberhasilan pembangunan tersebut.

Dari uraian Panitia Kampanye Milenium, juga dari Panitia yang ada di Indonesia, dijelaskan bahwa kampanye akan diselenggarakan di berbagai tempat, antara lain untuk Jakarta di Monas dan Masjid Al-Azhar, di Bandung di Pondok Pesantren Daarut Tauchid, di Bali akan diadakan Konser Bangkit di GWK, di Medan di Keuskupan Medan, atau di tempat-tempat lain yang sedang disiapkan atau belum disebar luaskan oleh panitia pusat.

Disamping kampanye yang akan diselenggarakan dengan partisipasi yang sangat besar itu, masyarakat diberi kesempatan luas untuk ikut berpartisipasi melalui pesan sms, email dan media komunikasi lainnya. Bahkan, masyarakat boleh saja menyelenggarakan kegiatan kampanye itu menurut selera dan kemampuan masing-masing di tempat yang segera bisa dilaporkan kepada panitia untuk dicatat, baik tempat maupun pesertanya. Pencatatan jumlah peserta itu akan sangat penting untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kepedulian itu akan dicatat dalam catatan *Muri* atau catatan *Guinness World Records*.

Indonesia seharusnya tidak perlu menunggu sampai ada kampanye ini, tetapi, seperti dilakukan oleh Yayasan Damandiri dan mitra kerjanya, sejak beberapa tahun ini, baik dengan program komunikasi melalui berbagai media cetak maupun melalui tayangan interaktif pada TVRI di Surabaya, Semarang dan Yogyakarta, telah berusaha menggugah perhatian untuk suksesnya program dan kegiatan MDGs.

Kita ingin menyampaikan bahwa Kampanye selama duapuluh empat jam bisa mempunyai dampak kalau diikuti dengan tindak lanjut yang jelas. Kampanye tidak akan efektif kalau tidak diikuti dengan program pemberdayaan dan pelayanan secara berkesinambungan. Kampanye harus diikuti dengan program-program dan kegiatan nyata dan sederhana yang mudah diikuti rakyat biasa secara kesinambungan.

Indonesia, baik menurut data yang dikeluarkan oleh panitia maupun oleh data dari BPS masih sangat jauh dari target-target yang ditetapkan PBB dan disepakati oleh pemerintah sendiri. Tingkat

kemiskinan justru meningkat kembali dan kalau tidak segera ditangani dengan upaya pengentasan kemiskinan dengan arah yang tepat dan terfokus mustahil bisa dicapai target Milenium yang telah disepakati.

Penduduk kita yang miskin masih sekitar 39 sampai 40 juta, atau lebih dari 17 persen, suatu jumlah yang sangat besar dan sukar diselesaikan. Setiap saat bisa bertambah karena mereka yang tepat diatas garis kemiskinan hampir stagnan dan kalau garisnya naik sedikit saja, jumlah penduduk miskin akan meningkat.

Ada sekitar 1 (satu) juta anak-anak balita, atau 28 persen dari balita di seluruh Indonesia, yang karena Posyandu di desa-desa dan kegiatan klinik dan Puskesmas agak mengendor dalam beberapa tahun terakhir ini, terkendala aksesnya terhadap fasilitas kesehatan. Apabila seruan revitalisasi Posyandu seperti dianjurkan Presiden tidak segera dilaksanakan dengan baik, dengan mudah anak-anak yang tidak berdosa itu akan makin rentan terhadap penyakit dan cita-cita penurunan tingkat kematian balita yang ditargetkan tidak terpenuhi.

Masyarakat kita, biarpun sebagian besar telah makin urban, tetapi kemampuannya masih sangat minim, pengetahuan dan kesadarannya tentang kesehatan masih terbatas, sehingga prioritas untuk memelihara kesehatan preventif masih jauh dari memuaskan. Apabila pelayanan kesehatan masih mengandalkan pendekatan kelembagaan, tergantung klinik dan Puskesmas, atau sistem jemput bola yang terbatas, hampir pasti penduduk akan cenderung merasa sehat, tidak akan datang ke klinik yang mereka rasakan mahal dan hanya menghabiskan uang saja. Seperti halnya program KB di masa lalu, para dokter dan tenaga para medis, utamanya bidan, perlu dikerahkan untuk menjemput bola ke

desa atau mengunjungi keluarga yang mempunyai anak balita di rumah-rumah mereka di desa.

Dalam bidang pendidikan, perintah UUD agar pemerintah meningkatkan jumlah anggaran untuk bidang pendidikan, belum bisa dilaksanakan. Akibatnya banyak gedung sekolah dan fasilitas pendidikan yang masih dibawah standar, sehingga kalau hal ini berlangsung lama, dikawatirkan sasaran dan target yang disepakati tidak tercapai, dan lebih dari itu, mutu lulusan sekolah kita akan kalah jauh dibandingkan dengan mutu anak-anak dari negara tetangga.

Anggaran pendidikan yang tidak mencukupi juga menjadi kendala bahwa pendekatan pemberdayaan anak masih belum diarahkan secara tajam kepada pendekatan manusia. Urusan yang banyak dikerjakan baru pada tingkat gedung dan mutu pendidikan, cakupan dan mutu anak didik atau siswa, masih jauh tertinggal. Banyak anak yang belum bisa lulus UAN, atau kalau lulus nilai yang diperolehnya rendah, sekedar cukup sebagai syarat lulus. Banyak anak-anak usia SLTP dan usia SLTA belum bisa sekolah, dan dikawatirkan untuk jangka lama masih tetap tidak bisa sekolah.

Keadaan diatas sukar diatasi karena jumlah keluarga miskin dengan pendapatan dibawah satu dolar atau dua dolar masih sangat banyak. Penyelesaian sementara melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), bukan pemberdayaan, oleh banyak kalangan dikritik justru merangsang penambahan pemiskinan. Karena adanya BLT semangat dan tekad untuk mandiri secara tidak langsung ditekan.

Banyak kalangan menduga bahwa banyak keluarga lebih baik

menunggu BLT, dan semangatnya bertambah loyo dan makin miskin. Semangat untuk bekerja keras, membangun dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang disandangnya kurang mendapat dukungan. Akibatnya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang pasif menunggu belas kasihan orang lain, bangsa yang mengemis.

Oleh karena itu Panitia Kampanye Dunia menganjurkan kepada siapa saja untuk ikut aktif dalam kampanye ini sebagai kekuatan raksasa yang memberi tekanan kepada pemimpin dunia di negara maju maupun mengajak para pemimpin di negara berkembang untuk menjadi pemimpin yang besar dengan mengambil langkah operasional nyata memberdayakan rakyatnya mengentaskan diri dari lembah kemiskinan.

Dalam kampanye bentuk besar-besaran atau kumpulan sekecil apapun Panitia menganjurkan agar dalam detik-detik berkumpul itu dibacakan ikrar yang intinya antara lain menyatakan bahwa :

- bangkitkan semangat bahwa yang berkumpul adalah tokoh dan penduduk yang peduli dan bangga ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan;
- merasa sangat prihatin bahwa seorang anak yang lahir di negara berkembang masih harus meninggal dunia 30 tahun lebih cepat dibandingkan dengan rekannya di negara maju;
- bukan untuk minta sumbangan tetapi menuntut keadilan karena mengetahui bahwa para pemimpin atas namanya rakyatnya telah berjanji akan memerangi kemiskinan;
- yang dibutuhkan adalah kemauan politik untuk mencapai atau

bahkan melampaui tujuan-tujuan MDGs, karena itu yang berkumpul berseru dengan lantang :

Kepada para pemimpin dari negara maju :

- Jadilah pemimpin yang besar dengan menepati janjinya, hapuskan hutang, berikan bantuan lebih besar, ubah peraturan perdagangan yang dapat menolong penghapusan kemiskinan;

Kepada para pemimpin negara berkembang :

- Jadilah pemimpin yang besar dengan tugas menyelamatkan orang miskin sebagai tanggung jawab utama kepemimpinan. Desakkan transparansi dan akuntabilitas nyata atas penggunaan setiap uang negara, atasi masalah ketimpangan, berantaslah korupsi dimulai dari diri sendiri.
- Jelaskan dalam pertemuan bahwa para anggota yang bertemu ingin menciptakan rekor dunia yang berdiri bersama menuntut aksi nyata bagi penghapusan kemiskinan. Rekor untuk menghancurkan pengingkaran janji yang pernah dibuat dan terus mengabaikan si miskin. Bukan rekor jumlah orang yang tewas karena kemiskinan.
- Bahwa yang berkumpul adalah bagian dari 6 milyar penduduk dunia yang peduli terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan menuntut keadilan sekarang. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Kita menginginkannya sekarang.

[

PILIHAN PRIORITAS LAPANGAN

SETELAH Presiden mencanangkan gerakan Pembangunan Manusia Indonesia 2006 lalu dengan arahan yang tegas, kini terpulang kepada seluruh aparat untuk segera bergerak menterjemahkan arahan itu menjadi program dan kegiatan dengan prioritas nasional yang tinggi itu di lapangan. Rakyat banyak sudah mendengar komitmen dan tekad Presiden.

Jangan disalahkan lagi dengan mengambil alasan Presiden belum melakukan penilaian dan arahan. Rakyat banyak, terutama yang berada pada posisi sangat marginal atau berada menumpuk pada posisi setengah klenger, yang mau bergerak sendiri tidak mampu, menunggu langkah konkrit aparat di lapangan. Mereka menanti pengembangan program dan pilihan prioritas penggarapan di lapangan.

Mereka yang ada dalam posisi termarginal mulai bertanya-tanya apakah arahan Presiden yang menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai akan diatur bersyarat menjadi sinyal resmi bantuan yang mereka terima selama ini akan dihapuskan. Lebih dari itu, mereka yang berada dalam suasana klenger, hidup segan mati tak mau, tidak sabar menanti perhatian yang lebih serius. Kalau kedua kelompok ini dibiarkan, dengan mudah keduanya akan dilanda angin prahara dan jatuh miskin, dan menambah sulit pengentasan kemiskinan yang digariskan dalam pernyataan nasional minggu lalu.

Kelompok pertama mengharapkan agar pengaturan kembali bantuan langsung tunai benar-benar menempatkan kelompok mereka sebagai manusia bermartabat. Artinya tidak lagi diperlakukan sebagai manusia tanpa daya yang setiap tiga bulan harus datang seperti “pengemis” menanti sedekah di kantor pos, menunggu giliran, mengulurkan secarik kertas dan tangan menengadahkan untuk menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp. 300.000,- untuk tiga bulan mendatang.

Mereka ingin diperlakukan sebagai manusia yang bisa berpikir, bekerja dan menghasilkan produk atau jasa dari keringat yang diperas dan mengucur penuh kebahagiaan karena merasa diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Mereka membutuhkan uluran tangan pemberdayaan yang ikhlas. Mereka memerlukan bantuan untuk menterjemahkan ilmu pengetahuan yang pelik dan rumit menjadi petunjuk praktis yang memberi bekal ketrampilan agar bisa berkiprah membangun manusia bermutu yang sanggup mengentaskan diri dari lembah kemiskinan dan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Para Gubernur dengan aparatnya bisa segera menggelar pertemuan koordinasi dengan Dinas-dinas, Bupati, Walikota dan jajaran yang berada dalam koordinasinya untuk menyiapkan langkah konkrit pengembangan lembaga dan program pendampingan untuk rakyat di pedesaan dan perkotaan.

Program dan kegiatan pemberdayaan yang merangsang kemandirian harus segera disiapkan. Bupati, Walikota dan jajarannya segera mempersiapkan jaringan organisasi pedesaan seperti PKK dan lembaga-lembaga lain yang menangani atau mempunyai jaringan pedesaan untuk berpartisipasi secara aktif. Petunjuk Presiden tentang kemitraan harus menjadi pedoman untuk mengembangkan kesempatan yang terbuka bagi seluruh organisasi masyarakat untuk ikut membantu penanganan pembangunan manusia yang bermutu dan sejahtera tersebut.

Lembaga-lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang dimasa lalu dengan baik membantu masyarakat melayani KB dan Kesehatan dihidupkan kembali, disegarkan, dan secara bertahap dikembangkan menjadi lembaga pemberdayaan untuk menangani masalah-masalah pengembangan manusia secara terpadu. Posyandu yang identik dengan pelayanan KB dan Kesehatan harus secara bertahap dikembangkan menjadi lembaga pemberdayaan dan pengayaan kemampuan keluarga dalam semua bidang yang menjadi fungsi utama keluarga.

Menurut UU nomor 10, dan PP yang menyertainya, fungsi keluarga yang utama menyangkut fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan hidup. Kedelapan fungsi utama keluarga itu adalah penjelmaan dari pokok-pokok utama yang memberi



syarat-syarat mutu manusia (index mutu manusia) dalam gaya Indonesia. Ini berarti bahwa pengembangan mutu manusia Indonesia bisa dilakukan oleh keluarga kalau kedelapan fungsi utama keluarga itu dikuasai oleh setiap keluarga Indonesia.

Oleh karena itu Posyandu sebaiknya dikembangkan menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga yang secara serentak dikerahkan untuk menjadi forum atau wahana pemberdayaan keluarga seperti ditegaskan minggu lalu oleh Presiden. Selanjutnya keluarga Indonesia yang jumlahnya lebih dari 50 juta itu dikerahkan untuk melakukan pembangunan manusia,

minimal dalam lingkungannya sendiri.

Pendekatan ini akan menjadi pendekatan gotong royong dalam jaringan luas yang sekaligus memberi kesempatan kepada setiap kelompok masyarakat yang jumlahnya dengan mudah bisa mencapai 500.000 – 750.000 kelompok dengan gerakan gegap gempita yang makin mandiri. Gerakan ini akan menjadi perekat hidup gotong royong yang merangsang partisipasi karena setiap kelompok akan berlomba mewujudkan hasil akhir berupa peningkatan mutu manusia yang bermartabat, bermutu serta sejahtera.

Greget dan perbincangan dalam masyarakat bukan lagi mengkritik kebijakan pemerintah atau unjuk kejengkelan karena pemerintah lamban, tetapi menjadi ajang pameran kerja keras yang berorientasi hasil berupa makin meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM), atau meningkatnya *Human Development Index (HDI)*.

Keberanian mengajak masyarakat pedesaan menjadi mitra pembangunan bukan barang baru. Dimasa lalu telah dikerjakan dengan berhasil dalam upaya program KB dan program pengentasan kemiskinan dengan berhasil. Tidak boleh lagi ada keragu-raguan. Pemerintah telah mencanangkan tekad dan komitmennya. Berikan kepercayaan kepada rakyat dengan fasilitasi dan mendampingan yang ikhlas. Rakyat pasti akan bergerak membangun keluarga dan masyarakatnya dengan perjuangan yang sama gigihnya. Insya Allah.

[